**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang- Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing - masing”.

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang dinamakan dengan peradilan satu atap (*One Roof System*). Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga pemerintah, Mahkamah Syar’iyah Langsa merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga menjadi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsi capaian kinerja Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Sejalan dengan kebijakan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang telah mencanangkan 6 (enam) faktor penting sebagai perwujudan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara tepat waktu ( sesuai SOP );

2. Pengelolaan dan peningkatan manajemen SDM;

3. Pengelolaan website;

4. Implementasi pelaksanaan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara);

5. Tersedianya meja informasi;

6. *Justice for All* (Prodeo dan Sidang Keliling);

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektif serta profesionalisme.

Akuntabilitas merupakan azas dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (***good governance***) dan pemerintahan yang bersih (***clean governance***), yang dapat didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, anggaran dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau lembaga kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau lembaga yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar’iyah Langsa ini adalah merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap awal tahun sebagai cerminan sejauh mana pencapaian pelaksanaan kinerja dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama tahun pelaporan.

1. **TUGAS DAN FUNGSI**

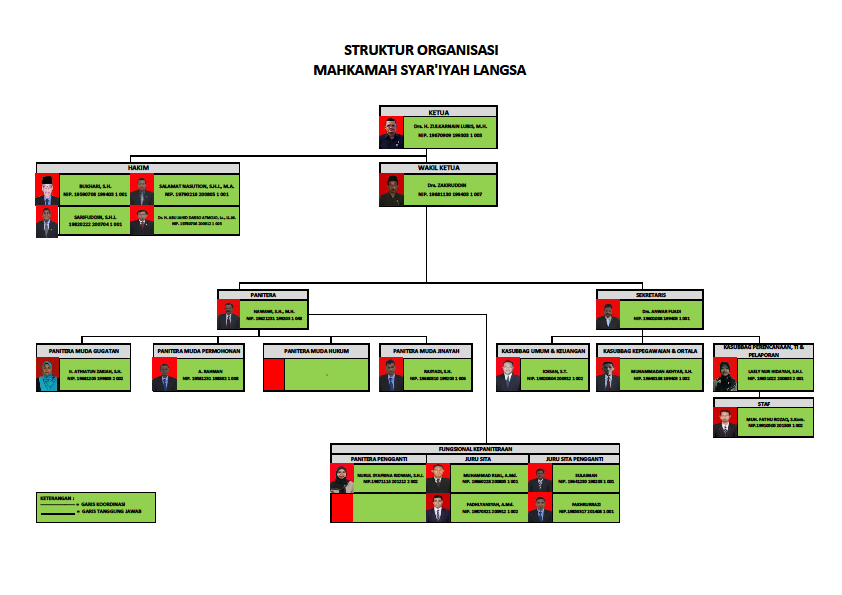
Mahkamah Syar’iyah Langsa sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kota Langsa, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mahkamah Syar’iyah Langsa bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam tingkat pertama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Mahkamah Syar’iyah Langsa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan (vide : pasal 53 ayat 3 Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);
2. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan yang diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : KMA Nomor KMA080/VIII/2006);
3. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : pasal 52 ayat 1 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009);
4. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan;
5. Fungsi lainnya, yakni pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pelayanan publik dan sebagainya (vide : SK KMA Nomor KMA/144/SK/VII/2007).
6. **STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Mahkamah Syar’iyah Langsa mengacu pada Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Struktur Organisasi Peradilan.

Adapun susunan organisasi Mahkamah Syar’iyah Langsa sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar’iyah Langsa

1. **SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Mahkamah Syar’iyah Langsa selama tahun 2016. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta sistematika penyajian ;

BAB II : Perencanaan dan Perjanjian kinerja menjelaskan mengenai rencana stratejik termasuk didalamnya visi-misi, tujuan dan sasaran strategis dan program utama kegiatan pokok, rencana kinerja tahunan serta penetapan kinerja;

BAB III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 menjelaskan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja;

BAB IV : Penutup menjelaskan kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang.